

BAB I

Konsep Dasar Ilmu Politik

1.1 Latar Belakang

Ilmu politik adalah salah satu cabang dari ilmu sosial, yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya yakni sosiologi, antropologi, dll. Dengan demikian maka ilmu politik berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial tsb yang objeknya adalah manusia sebagai anggota kelompok (group).

Ilmu-ilmu tsb mempelajari kelakuan manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Namun walaupun ilmu-ilmu tsb saling berdampingan dan berhubungan erat, tetapi tentu ada batasan-batasan antara ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya dengan melihat kepada sifat-sifat dan ruang lingkup ilmu politik itu sendiri. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan lain sebagainya.

Sistem politik hanya merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem yang terjadi dalam masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem teknik, sistem komunikasi dll. Setiap sistem masing-masing mempunyai fungsi tertentu untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini, maka sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat, yakni membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan yang mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai (baik yang bersifat materiil maupun non materiil). Maksudnya, sistem politik berfungsi merumuskan tujuan-tujuan masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan untuk kepentingan masyarakat.

Karena itu, perlu kiranya suatu masyarakat mengetahui dan memahami ilmu politik. Mulai dari lingkup kecil hingga besar.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka disini kami ingin membahas tentang “ ILMU POLITIK”

1.2 Perumusan Masalah

Untuk lebih sistematis, maka kami merumuskan masalah-masalah pokok yang akan dibahas dalam makalah ini sebagai berikut:

- a) Apa pengertian dari Ilmu politik ?
- b) Apa saja sifat dari ilmu politik ?
- c) Bagaimana pendekatan, metode, dan teknik ilmu politik ?
- d) Apa saja tujuan dan fungsi ilmu politik ?
- e) Apa saja teori-teori dalam ilmu politik ?
- f) Apa saja bidang kajian ilmu politik ?
- g) Bagaimana konsep dan generalisasi dari ilmu politik ?
- h) Bagaimana perilaku politik itu ?
- i) Apa saja ruang lingkup dalam ilmu politik ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka beberapa tujuan dari makalah ini, yaitu:

- a) Untuk mengetahui pengertian dari ilmu politik.
- b) Untuk mengetahui apa saja sifat dari ilmu politik.
- c) Untuk mengetahui bagaimana pendekatan, metode, dan teknik ilmu politik.
- d) Untuk mengetahui apa saja tujuan dan fungsi ilmu politik.
- e) Untuk mengetahui apa saja teori-teori dalam ilmu politik.
- f) Untuk mengetahui apa saja bidang kajian ilmu politik.
- g) Untuk mengetahui bagaimana konsep dan generalisasi dari ilmu politik.
- h) Untuk mengetahui bagaimana perilaku politik itu.
- i) Untuk mengetahui apa saja ruang lingkup dalam ilmu politik.

BAB II

PEMBAHASAN MASALAH

2.1 PENGERTIAN ILMU POLITIK

Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaimana menghambat penguasaan kekuasaan.

Ilmu politik mempelajari beberapa aspek, seperti :

- a. Ilmu politik dilihat dari aspek kenegaraan adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan Negara, dan lembaga-lembaga Negara serta hubungan Negara dengan warga negaranya dan hubungan antar Negara.
- b. Ilmu politik dilihat dari aspek kekuasaan adalah ilmu yang mempelajari ilmu kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup, dan hasil dari kekuasaan itu.
- c. Ilmu politik dilihat dari aspek kelakuan politik yaitu ilmu yang mempelajari kelakuan politik dalam system politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan dan kebijakan.

Konsep-konsep pokok yang dipelajari dalam ilmu politik :

- a. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya
- b. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelakunya
- c. Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternative sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai
- d. Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.
- e. Pembagian adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata sehingga timbul konflik

2.2. SIFAT ILMU POLITIK

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa ilmu politik adalah bermacam macam kegiatan dalam sistem suatu negara, yakni pengambilan kebijakan - kebijakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan tertentu. Idealnya, politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, dan bukan tujuan pribadi seseorang.

Mengenai sifat dari ilmu politik, dapatlah kita fahami dari beberapa defenisi tentang ilmu politik. Roger F. Soltau dalam *Introduction to Politics* berpendapat bahwa: “Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lainnya”.

Prof. Mr. Moh. Yamin mengemukakan bahwa: “Ilmu politik memusatkan tinjauannya kepada masalah kekuasaan dan bagaimana jalannya tenaga kekuasaan dalam masyarakat dan susunan negara, ilmu politik dengan sendirinya membahas dan mempersoalkan pembinaan negara dan masyarakat atau kekuasaan”.

Pada dasarnya ilmu politik paling erat kaitannya dengan ilmu negara. Yakni sama-sama mengupas dan menyelidiki hal-hal mengenai negara. Namun berbeda sifatnya, yakni ilmu negara menyelidiki dan mengajarkan teori-teori tentang asal mula negara, tujuan dan tugas negara, pemerintahan, dan sebagainya. Sedangkan ilmu politik menyelidiki dan menguraikan hidup negara itu, sikap dan tindak tanduknya dalam kehidupan warganya serta dalam pergaulan antar negara.

Dengan kata lain, ilmu politik bersifat membahas proses-proses yang berlangsung dalam suatu negara, seperti kekuasaan dan susunan masyarakat. Sedangkan ilmu negara membahas tentang teori-teori terbentuknya negara dan struktur negara atau bentuk pemerintahan negara tersebut.

Mengenai ilmu politik tersebut, M. Hutauruk, SH dalam bukunya *Garis Besar Ilmu Politik Pelita Keempat*, berpendapat bahwa: ilmu politik menyelidiki dan mempelajari proses-proses dalam pemerintahan dan masyarakat yang berintikan aktivitas, kompetisi dan kerjasama dalam memupuk dan menggunakan kekuasaan.

Dari beberapa defenisi tersebut maka dapat dirumuskan sifat ilmu politik tersebut:

1. menentukan prinsip-prinsip yang dijadikan patokan dan yang diindahkan dalam menjalankan pemerintahan.
2. mempelajari tingkah laku pemerintah sehingga dapat mengemukakan mana yang baik, mana yang salah dan menganjurkan perbaikan-perbaikan secara tegas dan terang.
3. mempelajari tingkah laku politik warga negara itu, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.
4. mengamati dan menelaah rencana-rencana sosial, kemakmuran, kerjasama internasional, dan

sebagainya.

Sistem politik bersifat terbuka, yakni terbuka untuk pengaruh dari luar sebagai akibat dari interaksi dengan sistem-sistem lain. Maksudnya politik tersebut dapat berinteraksi dan berubah dengan lingkungannya. Faktor lingkungan yang mempengaruhi contohnya tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan masyarakat.

2.3. PENDEKATAN, METODE, DAN TEKNIK

1. Pendekatan

Kajian ilmu politik dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung, bersifat deskriptif analitik, menekankan proses, bersifat induktif. Sedangkan pendekatan kuantitatif untuk memelihara diri mereka dari pengaruh koleksi data.. Menggunakan metode statistik untuk meneliti data dan menyimpulkan hasil sebagai penelitian. Metode ini mencoba ke hal-hal objektif.

2. Metode

Seperti ilmu sosial pada umumnya yang digunakan dalam ilmu politik pun menyangkut metode induksi dan deduksi. Metode induksi adalah serangkaian strategi ataupun prosedur penarikan simpulan umum yang diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mengkaji peristiwa yang khusus atas dasar fakta teoritis. Menurut **Iswara**, ada beberapa metode yang termasuk dalam metode induksi, seperti metode deskriptif, metode analisis, metode evaluatif, metode klasifikasi, dan metode perbandingan.

- a. **Metode deskriptif** adalah sebagai prosedur pengkajian masalah politik untuk memberikan gambaran terhadap kenyataan yang ada secara akurat.
- b. **Metode analisis** menekankan pada penelaahan secara mendalam terhadap masalah politik yang disusun secara sistematis dengan memperlihatkan hubungan fakta satu dengan yang lainnya.\
- c. **Metode evaluatif** merupakan serangkaian usaha penelaahan fenomena politik yang bersifat menentukan terhadap fakta yang dikumpulkan dengan dasar pada norma-norma.
- d. **Metode klasifikasi** adalah metode yang melandaskan pada pengelompokkan objek secara teratur yang masing-masing menunjukkan hubungan timbal balik.
- e. **Metode perbandingan** merupakan metode kajian politik yang menitikberatkan pada studi persamaan dan perbedaan atas dua objek.

Sedangkan metode deduksi merupakan serangkaian strategi ataupun prosedur dengan penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke khusus, dan dilakukan dalam pendekatan kuantitatif.

Terdapat metode lainnya yang digunakan dalam kajian ilmu politik antara lain metode filosofis, yuridis, historis, ekonomis, sosiologis, dan psikologis.

- a. **Metode filosofis** metode ini digunakan untuk meneliti masalah politik langsung yang berhubungan dengan kehidupan politik.
- b. **Metode yuridis** atau legalistik merupakan penekanan prosedur penelitiannya terhadap asas-asas legal secara yuridis.
- c. **Metode historis** dalam metode ini penelitian ilmu politik berdasarkan pada kenyataan sejarah.
- d. **Metode ekonomis** disangkutkan pada aspek-aspek ekonomi.
- e. **Metode sosiologis** bahwa dalam kajian politik, lembaga-lembaga politik dianalogikan sebagai fenomena sosial.
- f. **Metode psikologis** dalam penggunaannya kajian politik banyak menggunakan dalil-dalil psikologi sebagai acuannya.

Berbeda dengan **The Liang Gie** bahwa metode penelitian ilmu politik yang banyak digunakan adalah metode observasi, analisis, klasifikasi, pengukuran dan perbandingan.

- a. **Metode observasi** pengamatan tidak sekedar pengamatan langsung, tetapi juga tidak langsung terhadap fenomena politik. Pengamatan sistematis, teratur, terencana, kontinu, lalu ditarik simpulan.
- b. **Metode analisis** adalah suatu metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran untuk menelaah suatu hal secara mendalam.
- c. **Metode deskripsi** merupakan metode secara mendalam memberikan gambaran politik terhadap kondisi realitasnya. Upaya memberikan gambaran realitas secara akurat.
- d. **Metode klasifikasi** menggambarkan adanya pengelompokan objek kajian secara teratur untuk memudahkan pencarian adanya hubungan timbal balik. Untuk memudahkan pengelompokan terdapat aturan pokok yang menurut **Ciarke** mencakup:
 - 1) Pengelompokan harus masuk akal.
 - 2) Harus ada pengelompokan yang cukup untuk semua data.
 - 3) Hanya ada satu basis penggolongan.

- e. **Metode Pengukuran** merupakan metode untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau fenomena yang diteliti, baik yang menggunakan alat atau tidak.
- f. **Metode Perbandingan** merupakan metode yang dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan atau persamaan dari dua peristiwa politik, negara, kelompok, atau lebih.

3 . Teknik

Teknik yang banyak digunakan dalam ilmu politik banyak ragamnya, seperti: *field work, investigation, questionnaire, sampling, interview, opinionnaire, participant observer, schedule, direct observation, case study, dan action research.*

2.4 TUJUAN DAN FUNGSI ILMU POLITIK

a. Perspektif Intelektual

Tujuan politik adalah untuk tindakan politik. Agar dapat bertindak dengan baik secara politik, orang perlu mempelajari asas dan seni politik dan nilai-nilai yang dianggap penting, Jadi, perspektif intelektual dalam politik adalah perspektif yang mempergunakan diri sendiri sebagai titik tolak. Sebab perspektif itu bertolak dan dibangun berdasarkan apa yang dianggap salah oleh individu itu, dan individu tersebut yang memperbaikinya.

b. Perspektif Politik

Bahwa pandangan intelektual mengenai politik tidak banyak berbeda dengan pandangan politisi. Jika politisi bersifat segera, sedangkan intelektual dapat menjadi politisi jika ia mampu memasukkan masalah politik dalam pelayanan suatu kepentingan atau tujuan. Jika tujuan pertama politisi adalah memperoleh kekuasaan, maka tujuan yang kedua adalah mempertahankan kekuasaan.

c. Perspektif Ilmu Politik

Dalam hal ini, politik dipandang sebagai ilmu. Ia menilai dari sisi intelektual dengan pertimbangan kritis serta memiliki kriteria yang sistematis. Pendirian ini memandang pada kebutuhan kedepan, untuk meramalkan akibat tindakan politik maupun kebijaksanaan para politisi. Para politisi memandang politik sebagai pusat kekuasaan publik, kaum intelektual memandang politik sebagai perluasan pusat moral dari diri. Dengan demikian, politik sebagai ilmu menaruh perhatian pada dalil-dalil, keabsahan, percobaan, hukum, dan keragaman.

2.5 TEORI – TEORI ILMU POLITIK

Terdapat tiga penterian dalam ilmu politik, yaitu:

a. Teori Politik Empiris

Digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoritis ilmu politik.

b. Teori Politik Formal

Merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang tindihnya dengan teori sosial maupun teori publik. Tidak ada aturan keputusan yang secara simultan dapat memenuhi sejumlah kondisi yang sangat masuk akal.

c. Teori Politik Normatif

Merupakan teori politik yang paling dekat dengan *enterprise* tradisional. Sejauh ia berkenaan dengan kebijakan politik. Tujuannya adalah meletakkan prinsip-prinsip otoritas, kebebasan dan keadilan. Kemudian, mengkhususkan pada tatanan sosial, untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Tugas teori politik menurut pandangan ini adalah

- 1) Menjelajah apa makna kebebasan dan kemudian menerapkannya pada masalah-masalah praktis.
- 2) Untuk menemukan landasan tujuan dalam mendukung prinsip-prinsip politik yang mendasar.

2.6 BIDANG KAJIAN ILMU POLITIK

- a. Teori ilmu politik yang meliputi teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik
- b. Lembaga-lembaga politik yang meliputi UUD, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik.
- c. Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, pendapat umum, partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi.
- d. Hubungan Internasional yang meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional dan hukum internasional.

2.7 KONSEP DAN GENERALISASI ILMU POLITIK

a. Konsep-konsep dalam ilmu politik

Pada bagian terdahulu telah diuraikan lima konsep esensial yang sekaligus merupakan unsure pokok dalam pengertian ilmu politik. Berikut ini diuraian lagi berberapa konsep esensial lainnya;

- politik
- Negara
- Kekuasaan
- Pembuat keputusan (Decision Making)
- Kebijakan umum
- Distribusi dan Alokasi
- Kelompok Interest
- Sosialisasi Politik
- Kultur Politik

b. Generalisasi dalam ilmu politik

Berikut ini berberapa contoh generalisasi yang berkenaan dengan politik sebagaimana ditulis oleh Banks dan Clegg, Jr. (1977:344):

- (1). Didalam setiap masyarakat dan lembaga, peraturan dan hukum tumbuh untuk mengendalikan tingkah laku para individu warganya; para individu biasanya mengalami salah satu jenis hukum apabila penguasa berhasil menangkap mereka karena melanggar hukum.
- (2). Para penguasa cenderung menolak setiap perubahan yang dirasakan akan mengurangi kekuasaan dan pengaruh mereka.
- (3). Konflik timbul dalam suatu system politik apabila para individu atau kelompok mempunyai tujuan yang bersaing dan mengartikan hokum secara berlainan.

2.8 PERILAKU POLITIK

Perilaku politik atau (Inggris: Politic Behaviour) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah:

- Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
- Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat
- Ikut serta dalam pesta politik
- Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
- Berhak untuk menjadi pimpinan politik
- Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku

2.9 RUANG LINGKUP ILMU POLITIK

Ruang lingkup ilmu politik menurut pemahaman kami adalah batasan batasannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Maka dapat dipahami dengan menguraikan hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu tersebut.

1. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi

Semua ilmu sosial pada dasarnya mempelajari kelakuan manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Ilmu politik berhubungan erat sekali dengan ilmu sosiologi, karena ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi keputusan kebijaksanaan dalam ilmu politik. Baik ilmu sosiologi maupun ilmu politik mempelajari negara.

Namun bagi ilmu politik negara merupakan obyek penelitian pokok, sedangkan dalam sosiologi negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian masyarakat.

2. Hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi

Antropologi mempelajari pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana dalam masyarakat, khususnya dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda-beda pada

tiap-tiap masyarakat. Sedangkan ilmu politik lebih memusatkan pada kekuasaan dan kebijakan dengan memahami struktur sosial pada masyarakat.

3. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi

Politik juga berhubungan erat dengan ilmu ekonomi, dimana prinsip yang tercakup dalam ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik yakni bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat.

Seorang sarjana politik misalnya, dapat meminta bantuan sarjana ekonomi tentang syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi guna memperoleh tujuan-tujuan politis tertentu, khususnya yang menyangkut pembinaan kehidupan demokrasi.

4. Hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi

Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi-segi ekstern (lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, gerakan-gerakan massa) maupun dari segi intern (kesehatan fisik perorangan, semangat, dan emosi).

Dengan demikian psikologi sosial mempengaruhi suatu hasil keputusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan dengan memperhatikan sikap dan tindakan-tindakan sosial masyarakat yang melahirkan tuntutan-tuntutan terhadap kebijakan politik suatu pemerintahan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Sebagai penutup, perlu kiranya diambil simpulan dari apa yang telah dibahas dan di uraikan pada bab-bab sebelumnya. Dapat ditarik ke beberapa simpulan, sebagai berikut:

- 1) Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan.
- 2) Ilmu Politik mempelajari beberapa aspek:
 - a. Ilmu politik dilihat dari aspek kenegaran
 - b. Ilmu politik dilihat dari aspek kekuasaan
 - c. Ilmu politik dilihat dari aspek kelakuan politik
- 3) Konsep pokok Ilmu politik:
 - a. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah
 - b. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang
 - c. Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternative
 - d. Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan
 - e. Pembagian adalah penjatahan dari nilai-nilai
- 4) Definisi dari sifat ilmu politik:
 - a. menentukan prinsip-prinsip yang dijadikan patokan dan yang diindahkan dalam menjalankan pemerintahan.
 - b. mempelajari tingkah laku pemerintah sehingga dapat mengemukakan mana yang baik, mana yang salah dan menganjurkan perbaikan-perbaikan secara tegas dan terang.
 - c. mempelajari tingkah laku politik warga negara itu, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.
 - d. mengamati dan menelaah rencana-rencana sosial, kemakmuran, kerjasama internasional, dan sebagainya.

5) a. Pendekatan Ilmu politik menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif.

b. Beberapa metode yang digunakan dalam Ilmu Politik (metode induksi)

- metode deskriptif
- metode analisis
- metode evaluative
- metode klasifikasi
- metode perbandingan

Metode yang digunakan dalam ilmu Politik (metode deduksi)

- Metode filosofis
- Metode yuridis
- Metode historis
- Metode ekonomis
- Metode sosiologis
- Metode psikologis

c . Teknik yang digunakan dalam ilmu politik : *field work, investigation, questionnaire, sampling, interview, opinionnaire, participant observer, schedule, direct observation, case study, dan action research.*

6) Tujuan dan Fungsi Ilmu politik :

- Perspektif Intelektual
- Perspektif Politik
- Perspektif Ilmu Politik

7) Teori-teori Ilmu Politik

- Teori politik empiris
- Teori politik formal
- Teori politik normative

8) Bidang kajian ilmu politik :

- a. Teori ilmu politik yang meliputi teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik
- b. Lembaga-lembaga politik yang meliputi UUD, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan social dari pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik.
- c. Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, pendapat umum, partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi.
- d. Hubungan Internasional yang meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional dan hukum internasional.

9) Konsep Ilmu politik

- politik
- Negara
- Kekuasaan
- Pembuat keputusan (Decision Making)
- Kebijakan umum
- Distribusi dan Alokasi
- Kelompok Interest
- Sosialisasi Politik
- Kultur Politik

Generalisasi Ilmu Politik

- (1). Didalam setiap masyarakat dan lembaga, peraturan dan hukum tumbuh untuk mengendalikan tingkah laku para individu warganya; para individu biasanya mengalami salah satu jenis hukum apabila penguasa berhasil menangkap mereka karena melanggar hukum.
- (2). Para penguasa cenderung menolak setiap perubahan yang dirasakan akan mengurangi kekuasaan dan pengaruh mereka.

(3). Konflik timbul dalam suatu system politik apabila para individu atau kelompok mempunyai tujuan yang bersaing dan mengartikan hukum secara berlainan.

10) Perilaku Politik:

- Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
- Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat
- Ikut serta dalam pesta politik
- Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
- Berhak untuk menjadi pimpinan politik
- Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku

11) Ruang Lingkup Ilmu Politik

1. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi
2. Hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi
3. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi
4. Hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1993.

Hutauruk, M. Garis besar ilmu politik pelita keempat 1984-1989. Jakarta: Erlangga. 1984.

Varma, SP. Teori politik modern. Jakarta: Rajawali Pers. 1992.

Supardan, Dadang. Pengantar Ilmu Sosial. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008.

Wiki. (2008). Politik. [online]. Tersedia: <http://id.wikipedia.org/wiki/Politik> [9 Maret 2008]

Hidayatlubis. (2008). Sifat dan Ruang Lingkup Ilmu Politik. [online]. Tersedia: <http://www.geocities.com/hidayatlubis/politik.html> [9 Maret 2008]